

PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK: STUDI KASUS PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

Khansa Khairunnisa, Neneng Sobibatu Rohmah
Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman
khansa.khairunnisa@unsoed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari permasalahan kualitas internal partai politik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Partai politik dengan kualitas internal yang buruk memicu pengambilan keputusan yang menyimpang dari nilai demokrasi dan terkesan pragmatis. Adanya perubahan dukungan partai gerindra dalam pilkada banyumas merupakan salah satu penyebab utama munculnya calon tunggal atas keputusan partai yang pragmatis. Penyebab perubahan dukungan pada internal partai perlu diteliti lebih jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana partai tersebut terinstitusionalisasi dalam menjalankan fungsi politiknya dan bentuk perubahan dukungan DPC Gerindra Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi sebagai bagian dari studi lapangan. Informan dipilih secara *purposive sampling*. Informan dibagi menjadi dua yaitu informan utama dan pembanding. Informan utama meliputi pengurus DPC Partai Gerindra, anggota tim penjangkaran dan bakal calon kepala daerah. Sedangkan informan pembanding meliputi akar rumput partai gerindra, pengamat politik lokal, jurnalis dan tim pemenang pasangan calon Sadewo - Lintari. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan perubahan dukungan disebabkan karena rendahnya pelembagaan partai dan didorong oleh sistem rekrutmen dan kandidasi bakal calon kepala daerah dari DPC Gerindra Banyumas yang dilaksanakan dengan minimnya partisipasi kader, dan sistem yang bersifat eksklusif serta sentralistik. Alasan perubahan dukungan disebabkan karena adanya miss komunikasi, kurangnya modal politik dan sikap pragmatis.

Kata kunci: Pilkada, Partai Politik, Rekrutmen dan Kandidasi, Pelembagaan Partai Politik

Pendahuluan

Perjalanan demokrasi dalam sebuah negara bukanlah satu hal yang mudah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi. Abraham linclon dalam pidatonya pada 1863 menyampaikan bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Artinya, segala kepentingan dalam suatu negara harus dijalankan atas dasar kepentingan rakyat (Prayitno & Prayugo, 2023). Salah satu hal yang penting dalam sistem demokrasi adalah terkait dengan keberadaan partai politik.

Partai politik memiliki peran yang besar dalam sebuah negara demokrasi untuk menjembatani antara rakyat dengan pemerintah. Indonesia mengatur partai politik melalui Undang-Undang (UU) Nomor 02 Tahun 2011. UU tersebut mengatur secara spesifik mengenai partai politik mulai dari kepengurusan internal hingga pada fungsi partai politik yang harus dijalankan. Fungsi partai politik dalam undang-undang tersebut dijelaskan lebih lanjut melalui lima hal. Adapun kelima hal tersebut diantaranya sarana pendidikan politik, pencipta iklim kondusif, penyerap/penyalur aspirasi, partisipasi politik dan rekrutmen politik. Negara telah mengatur partai politik melalui undang-undang tersebut. Maka, realisasi pelaksanaan dari fungsi yang diatur negara sangat bergantung pada kualitas internal partai. Maka dari itu, supaya partai politik mampu menjalankan fungsi sesuai amanah UU No 2 Tahun 2011 kualitas partai politik menjadi hal yang penting.

Partai politik dengan kualitas internal yang baik dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Pelaksanaan internal dalam partai politik juga harus didasarkan pada prinsip demokrasi. Mulai dari pemilihan pengurus partai, pengambilan keputusan partai hingga pada pembiayaan partai. Hal tersebut harus dijalankan demi penyelenggaraan demokrasi dan terlaksananya fungsi partai politik secara maksimal. Maka dari itu, untuk dapat mengetahui kualitas internal partai politik maka diperlukan pelembagaan partai. Upaya untuk meninjau proses pelembagaan partai politik adalah bagian dari upaya memastikan demokrasi diisi oleh partai politik yang berkualitas (Randall dan Lars, 2002 dalam Suryana, Ardiansyah, & Manan, 2020).

Menurut Jakobi, pelebagaan partai merupakan sebuah usaha untuk penguatan nilai/ideologi terhadap para anggota dan proses kaderisasi (Jamil, Maksum, Sopyan, & Huda, 2024). Terkait pelebagaan partai Vicky Randall dan Lard Svasand mengemukakan empat indikator untuk mengukur kualitas atau pelebagaan partai politik. Keempat hal tersebut yaitu *systemness*, *value infusion*, *decisional autonomy* dan *reification*. Jika keempat hal tersebut telah dijalankan secara maksimal maka kualitas partai politik dapat dikatakan baik. Sebuah partai politik agar tetap bertahan dalam persaingan politik kontemporer haruslah memiliki tingkat pelebagaan partai yang baik, karena dengan pelebagaan ini partai memiliki orientasi hasil jangka panjang (Sevindo *et al.* 2023)

Keputusan partai sangat bergantung pada tingkat pelebagaan partai politik. Hal tersebut berkaitan dengan kestabilan dan kekokohan partai politik terkait optimalisasi fungsi partai seperti yang disampaikan oleh Huntington. Namun, saat ini Indonesia terkadang dihadapkan dengan keputusan partai yang pragmatis sehingga mencederai nilai demokrasi. Keputusan pragmatis partai politik terkadang terlihat pada saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Pemilu sangat berkaitan dengan partai politik. Pemilu memposisikan partai politik sebagai peserta pemilu. Keputusan pragmatis partai politik terlihat pada pemilu tahun 2024 khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada 2024 yang lalu banyak diwarnai dengan calon tunggal. Adanya calon tunggal diakibatkan karena munculnya koalisi besar parpol saat pencalonan, lemahnya kaderisasi partai dan biaya politik yang mahal (Hendarto, 2024).

Daerah dengan peserta calon tunggal salah satunya adalah Kabupaten Banyumas. Salah satu penyebab adanya calon tunggal yaitu perubahan dukungan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Banyumas. Semula DPC Gerindra Banyumas mencalonkan Maaruf Cahyono (Non Kader Partai Gerindra) dan Rachmat Imanda (Sekretaris

DPC Gerindra Banyumas) namun kemudian berubah menjadi mendukung pasangan Sadewo – Lintarti. Hal tersebut sangat mengejutkan karena sebelumnya terlihat aktivitas Partai Gerindra yang telah menghimpun dukungan untuk Maaruf - Imanda. Salah satu bentuk dukungannya adalah turunnya surat rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk mendukung Maaruf - Imanda dalam Pilkada Banyumas tahun 2024. Selain itu, diketahui pula bahwa pasangan Maaruf - Imanda juga telah menghimpun dukungan dari partai lain dengan adanya koalisi banymas maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat upaya dari DPC Gerindra Banyumas untuk menjalankan rekrutmen politik meskipun pada akhirnya keputusan yang dijalankan tidak sesuai dengan proses yang telah dilalui.

Diketahui Rachmat Imanda merupakan kader Partai Gerindra. Dirinya telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas dari Fraksi Gerindra selama empat periode. Pengalaman selama empat periode tersebut seharusnya dapat membuktikan bahwa Rachmat Imanda memiliki kemampuan di bidang legislatif yang cukup baik. Majunya Imanda sebagai salah satu bakal calon kepala daerah juga didukung oleh Pimpinan Anak Cabang (PAC) pada level kecamatan se-Kabupaten Banyumas (Zain F. M., 2024). Maka sebab itu, seharusnya DPC Gerindra Banyumas mendorong kadernya untuk dapat berkompetisi pada pilkada.

DPC Gerindra Banyumas juga memiliki perolehan suara yang cukup baik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di tahun 2024. Di Pilpres, Prabowo - Gibran mendapatkan perolehan suara sebanyak 558.230 yang menghasilkan kemenangan pasangan tersebut sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Sedangkan pada Pileg Kabupaten Banyumas, Partai Gerindra memperoleh suara sebanyak 158.226 suara dengan akumulasi sebanyak 7 kursi.

Keputusan perubahan dukungan tersebut tidak sesuai dengan kewajiban partai politik dalam menjalankan fungsi khususnya soal rekrutmen politik. Pengabaian fungsi tersebut menggambarkan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada sebuah kepentingan yang menjadikan partainya pragmatis. Tak hanya itu, perubahan dukungan juga mencerminkan kurangnya konsistensi partai politik dalam mengambil sebuah keputusan. Inkonsistensi tersebut menunjukkan masih adanya hal yang kurang maksimal pada internal partai politik.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi internal partai politik melalui 4 indikator pelebagaan partai menurut randall dan svasand khususnya partai gerindra yang difokuskan pada saat tahapan pelaksanaan pilkada. Maka dari itu, Untuk mencapai tujuan tersebut, rumusan masalah difokuskan terkait dengan tingkat pelebagaan partai gerindra pada pilkada banyumas tahun 2024.

Kerangka Teoretis

1. Pelebagaan partai politik

Setiap keputusan yang diambil oleh partai politik erat kaitannya dengan kondisi atau kualitas pada internal partai politik tersebut. Kondisi atau kualitas internal tersebut dapat dilihat melalui pelebagaan partai politik. Pelebagaan partai politik menurut Huntington (1973) adalah proses pengorganisasian dan pengembangan struktur, prosedur, serta norma-norma yang memungkinkan sebuah partai politik menjadi institusi yang stabil, kokoh, dan mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara berkelanjutan (Sidiq, Kurniawan, Warganegara, & Barokah, 2023).

Menurut Randal dan Svasand terdapat alat untuk menakar sejauh mana partai politik melembagakan diri (Randal dan Svasand, 2002). Pertama yaitu sistem. Sistem dalam pelebagaan partai politik digunakan untuk melihat struktur kekuasaan dalam internal partai politik tersebut. Terdapat poin-poin lain yang digunakan untuk melihat bagaimana sistem

dalam partai politik dijalankan. Poin tersebut diantaranya struktur kekuasaan internal, regulasi suksesi, proses pembuatan keputusan, relasi hubungan pengurus pusat dan daerah serta regulasi akses sumber keuangan (Fadlurrohman, 2017). Kedua yaitu *decisional autonomy* atau otonomi dalam pembuatan keputusan. *Decisional autonomy* dapat dilihat dari seberapa otonom proses pembiayaan dan pembuatan proses kebijakan dalam partai politik terhadap aktor atau institusi diluar partai politik tersebut. Ketiga value infusion yaitu tingkat internalisasi nilai dan norma partai oleh anggotanya (malindir & nabila, 2025). Selain itu, nilai tersebut juga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan setiap keputusan oleh partai politik. Keempat, *Reification* atau citra publik terhadap partai politik tersebut. *Reification* juga dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh partai politik berhasil membentuk persepsi masyarakat dengan kebijakan yang diusung. Adanya pelembagaan partai politik juga bertujuan untuk optimalisasi fungsi partai dalam menanggapi setiap permasalahan yang terjadi baik di internal maupun di eksternal (Pratama, Rusta, & Tamrin, 2022). Pelembagaan partai politik membentuk struktur dan aturan yang memungkinkan proses rekrutmen politik berlangsung secara adil, terbuka, dan terus menerus, sedangkan keberhasilan dalam rekrutmen politik menjadi tolak ukur efektivitas pelembagaan dalam menciptakan pemimpin yang sah dan berkompeten.

Partai politik sebagai sebuah institusi resmi dalam sebuah demokrasi memiliki fungsi krusial. Dalam menjalankan demokrasi di sebuah negara hendaknya partai politik menjalankan fungsi secara maksimal. Salah satunya mengenai fungsi rekrutmen partai politik. Fungsi tersebut tercermin dalam pelaksanaan pilkada karena partai politik menentukan kualitas pemimpin dan demokrasi elektoral. Partai politiknya seharusnya menjalankan sistem rekrutmen dan kandidasi secara maksimal dengan harapan munculnya keputusan yang baik bagi berlangsungnya demokrasi. Adapun keputusan yang diambil oleh partai politik sangat bergantung pada kestabilan kondisi internal partai politik tersebut. Kestabilan partai politik

dapat dilihat melalui pelembagaan partai politik. Adapun pelembagaan partai dapat dilihat berdasarkan 4 indikator yaitu *system*, *decisional autonomy*, *value infusion*, dan *reification*.

2. Rekrutmen dan Kandidasi

Pelaksanaan Pilkada berkaitan langsung dengan salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan perekrutan kader untuk mengisi jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Partai politik sebagai sebuah institusi resmi dalam sebuah negara demokrasi hendaknya menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas pemimpin yang muncul yang pada akhirnya sangat ditentukan oleh bagaimana partai menyeleksi dan menyiapkan calon-calonnya. Jika proses rekrutmen dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan calon kepala daerah dengan kualitas yang baik. Hal tersebut juga dapat menghadirkan kompetisi pilkada yang demokratis antar partai politik melalui calon kepala daerah.

Penentuan calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik erat kaitannya dengan sistem rekrutmen dan kandidasi. Menurut Rahat dan Hazan, sistem rekrutmen dan kandidasi mendasarkan empat hal pokok yaitu siapa kandidat yang dinominasikan, siapa yang menyeleksi, dimana kandidat diseleksi dan bagaimana kandidat diputuskan (Prihatmoko, 2022). Terkait dengan siapa kandidat yang diseleksi dalam rekrutmen politik dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat inklusifitas (semua warga negara) atau eksklusifitas (anggota partai dan syarat tambahan). Kemudian terkait dengan siapa yang menyeleksi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan inklusifitas dan eksklusifitas. Namun penyeleksi inklusif merujuk pada pemilih yang memiliki hak memilih sedangkan penyeleksi eksklusif merujuk pada kandidasi yang ditentukan oleh pemimpin partai (Putra, 2016).

Terkait dimana kandidat diseleksi dapat dijelaskan melalui metode yang ada pada partai politik tersebut. Adapun metode tersebut dapat

berupa metode seleksi sentralistik atau desentralisasi. Metode sentralistik ketika kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional. Selain itu, pengambilan keputusan juga dilakukan tanpa mempertimbangkan perwakilan wilayah dan masukan dari struktur pada daerah. Sedangkan metode desentralisasi dapat dipahami ketika kandidat diseleksi oleh penyeleksi partai lokal dan keputusan juga berada pada tingkatan lokal. Selanjutnya, terkait bagaimana kandidat diseleksi dapat dijelaskan melalui dua model yaitu model pemilihan dan penunjukan. Pada model pemilihan kandidat dipilih lewat proses voting, dan dalam bentuk murninya hasil pemilihan itu tidak bisa diubah oleh siapa pun. Kedua, melalui sistem penunjukan, yaitu kandidat langsung ditetapkan oleh pimpinan partai tanpa proses pemilihan, dan keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari lembaga partai lainnya (Putra, 2016).

3. Pragmatisme Politik

Adanya sistem rekrutmen dan kandidasi yang telah dijalankan kemudian menemukan tantangan baru yang terkait dengan pragmatism politik sebagai dasar atas keputusan partai politik yang diambil. Pragmatisme dalam pilkada dapat muncul yang kemudian menjadi dinamika tersendiri dalam setiap pilkada. Pragmatisme politik merupakan suatu upaya untuk mencapai keinginan dalam berpolitik dengan menempuh cara atau jalur yang bersifat jangka pendek dan menguntungkan untuk mencapai keberhasilan dalam memenangkan kontestasi supaya memperoleh kekuasaan (Ekowati, 2019). Proses rekrutmen dan kandidasi juga terkadang dapat berbeda setiap partai politik karena terdapat pengaruh pragmatisme sebagai dasar dari keputusan yang diambil. Maka dari itu, hal tersebut erat kaitannya dengan kualitas atau kondisi dari internal partai politik.

4. Penelitian terdahulu

Pada sebuah penelitian dibutuhkan penelitian terdahulu untuk membandingkan penelitian yang dilakukan dan penelitian yang telah ada. Selain itu, adanya penelitian terdahulu dapat digunakan untuk mencari kebaruan atau *novelty* dari penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu, pada penelitian ini, peneliti menemukan lima penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan mampu untuk dijadikan bahan rujukan. Penelitian pertama, Pelembagaan Partai Gerindra Dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori pelembagaan partai politik dengan empat indikator menurut Randall dan Svasand. Pelembagaan partai politik dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kemenangan dari partai gerindra dalam pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 (Sevindo, Asrinaldi, & Rusta, 2023).

Penelitian kedua, Institutionalisi partai politik melalui penataan calon anggota Legislatif di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan teori pelembagaan partai politik untuk mengetahui penataan caleg partai gerindra di Kabupaten Purbalingga dan Banyumas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan caleg diperlukan untuk meningkatkan keterpilihan caleg dan perolehan suara partai politik. (pratiwi & Nurprojo, 2023)

Penelitian ketiga, Pelembagaan Partai Politik : Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019. Penelitian ini menganalisis kondisi internal PSI melalui pelembagaan partai politik dengan empat indikator Randall dan Svasand. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelembagaan PSI di Kota Bandung masih lemah dan masih perlu perbaikan kondisi internal partai (Suryana, Ardiansyah, & Manan, 2020)

Penelitian keempat, Pelembagaan Partai Politik : Studi Kasus Partai Koalisi Incumbent dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada. Penelitian ini

berangkat dari kesuksesan petahana dalam mempertahankan kemenangan pada pilkada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internal partai politik masih mengalami kelemahan dalam pelebagaan. Hal tersebut tercermin dalam pembagian tugas dan tanggungjawab yang tidak seimbang antara pengurus pusat dan daerah.

Penelitian kelima, *Problem* Pelebagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak Di Jawa Timur. Penelitian ini membahas mengenai fenomena munculnya calon tunggal dalam pilkada yang diungkap dengan mengetahui kondisi internal partai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa munculnya calon tunggal menandakan hilangnya kompetisi dalam menjaring representasi, hilangnya kompetisi dalam sistem kepartaian, gejala disfungsi partai politik, dan adanya gejala perilaku tidak demokratis.

Kebaharuan penelitian ini dibandingkan kelima penelitian terdahulu yang ditemukan terletak pada penggunaan teori pelebagaan partai yang digunakan untuk melihat kondisi internal partai khususnya dalam tahapan pilkada 2024. Selain itu, keputusan perubahan dukungan juga akan dilihat dengan seberapa kuat pelebagaan partai politik karena pelebagaan partai politik yang kuat memengaruhi optimalisasi fungsi partai politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait (Rokhani, 2023). Pendekatan studi kasus digunakan untuk menggali fenomena tertentu secara rinci melalui berbagai prosedur pengumpulan data dalam periode tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang relevan, yaitu

anggota tim penjaringan, kader partai gerindra, bakal calon kepala daerah, kader akar rumput, pengurus DPC Gerindra Banyumas, dan pengamat politik lokal. Pengumpulan data berfokus pada dinamika pencalonan yaitu Bulan April – Agustus 2024.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman, yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi yang berlangsung secara simultan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap temuan penelitian. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber melalui perbandingan informasi dari wawancara, observasi, dokumen, dan dokumentasi visual agar data yang diperoleh valid dan sesuai dengan tujuan penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara antara DPC Gerindra Banyumas dengan pengamat politik lokal, *grassroot*, dan jurnalis.

PEMBAHASAN

Pelembagaan Partai Gerindra di Kabupaten Banyumas

Pelembagaan partai politik berkaitan dengan pilkada. Partai politik menjalankan fungsi rekrutmen dalam kontestasi pilkada. Sedangkan pelembagaan partai politik memiliki tujuan untuk optimalisasi fungsi partai politik. Selain itu, melalui pelembagaan partai politik dapat melihat seberapa kuat daya saing suatu partai dalam mengikuti pilkada karena melalui pelembagaan partai politik dapat dilihat empat indikator. Keempat indikator tersebut yaitu Sistem, *Reification*, *Decisonal autonomy* dan *Value infusion*. Ketidaksiapan partai politik untuk mengajukan paslon dalam Pilkada juga disebabkan karena rendahnya pelembagaan partai politik itu sendiri (Fadlurrohman, 2017). Maka dari itu untuk melihat keputusan partai gerindra terkait perubahan dukungan yang terjadi juga perlu dilihat melalui aspek pelembagaan partai politik.

1. Sistem

Pelembagaan partai politik dapat dilihat melalui sistem dari partai politik. Hal tersebut berkaitan dengan proses pengelolaan partai dari segi internal dalam menjalankan fungsi-fungsi partai politik (Sevindo, Asrinaldi, & Rusta, 2023). Proses pengelolaan partai dari segi internal dilihat berdasarkan aturan, persyaratan, prosedur serta mekanisme yang disepakati dan ditetapkan oleh partai politik melalui AD/ART. AD/ART dalam partai politik memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga stabilitas dan konsistensi partai politik (Sajian, RR.Cahyowati, & Wibowo, 2023).

Partai Gerindra memiliki AD/ART yang dijadikan dasar untuk melakukan aktifitas partai. AD/ART tersebut mengatur mulai dari syarat untuk menjadi anggota partai hingga pada pemberian sanksi. Selain itu, tertulis pula mengenai anggota partai Gerindra yang dipersiapkan untuk mengisi jabatan politik dan jabatan publik. Hal tersebut kemudian didukung oleh salah satu misi partai Gerindra yaitu merebut kekuasaan pemerintah yang salah satunya melalui pilkada dengan tujuan menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih di setiap tingkat pemerintah. Adanya misi partai yang tertuang dalam AD/ART tersebut hendaknya terlaksana dalam pelaksanaan pilkada. Bentuk pelaksanaan dapat berupa mengusulkan kadernya untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah.

Terkait mekanisme untuk menentukan bakal calon kepala daerah yang diusung, pada AD/ART tidak secara spesifik dijelaskan. Namun pada bab yang membahas mengenai dewan pimpinan daerah/cabang disinggung mengenai wewenang yang berkaitan dengan bakal calon kepala daerah. Dalam AD tertulis bahwa DPC memiliki wewenang untuk mengajukan calon bupati/walikota dan calon wakilnya dari partai Gerindra kepada DPP atas persetujuan DPD.

Meskipun AD/ART Partai Gerindra memberikan garis besar mengenai kewenangan DPC dan DPD dalam mengajukan bakal calon kepala daerah, berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan mekanisme

penjaringan calon yang belum diatur secara rinci dalam aturan formal partai. Pada praktiknya tim desk Pilkada dibentuk untuk menjaring bakal calon kepala daerah di tingkat daerah. Namun, pembentukan tim desk ini tidak ditemukan dasar pengaturannya dalam AD/ART maupun dalam pedoman internal lainnya, sehingga mekanismenya lebih bersifat ad-hoc dan tidak terstandarisasi.

Ketiadaan aturan yang spesifik tersebut menunjukkan bahwa proses penjaringan calon kepala daerah di Partai Gerindra belum sepenuhnya terinstitusionalisasi. Hal ini menandakan bahwa sistem rekrutmen politik belum berjalan berdasarkan prosedur yang baku dan terdokumentasi, melainkan masih bergantung pada keputusan internal yang bersifat fleksibel dan situasional menjelang pilkada. Dengan demikian, praktik pembentukan tim desk pilkada justru menegaskan adanya kesenjangan antara aturan formal partai dengan implementasi mekanisme penjaringan calon di tingkat daerah.

Adapun sistem rekrutemen dan kandidasi partai gerindra pada pilkada dilaksanakan dengan beberapa tahapan. Sistem rekrutmen dan kandidasi tersebut dapat dilihat melalui 4 hal yang terkait dengan hal tersebut menurut Rahat dan Hazan. Keempat hal tersebut diantaranya siapa yang diseleksi, siapa yang menyeleksi, dimana kandidat diseleksi dan bagaimana kandidat diseleksi.

Pertama, terkait siapa yang diseleksi. Salah satu kader partai gerindra yang mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah adalah Rachmat Imanda yang merupakan Sekretaris DPC Partai Gerindra. Pendaftaran tersebut simbolis dilakukan dengan mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati (Wahyudi, 2024). Dengan mendaftarnya Rachmat Imanda merupakan hal yang baik karena berdasar pada Anggaran Dasar bahwa kader partai dipersiapkan untuk menjadi calon pejabat publik.

Menurut Yusup (hasil wawancara langsung, 11 Desember 2025), Rachmat Imanda merupakan satu-satunya kader partai gerindra yang mendaftar sebagai bakal calon kepala daerah. Selain itu ada beberapa tokoh lain yang coba mendaftar melalui DPC Gerinda Banyumas. Namun Yusup mengungkapkan bahwa tidak ada kandidat dari kader partai gerindra selain Imanda dan terdapat beberapa tokoh lain yang mencoba mendaftar namun bukan merupakan kader dari partai gerindra atau non kader.

Dari beberapa kandidat yang mendaftar, kemudian muncul dua nama yaitu Maaruf Cahyono dan Rachmat Imanda sebagai pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Gerindra. Hal tersebut dibuktikan dengan turunnya surat rekomendasi dari DPP Partai Gerindra. Surat rekomendasi tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani pada 14 Agustus 2024 di Jakarta (Firmansyah, 2024).

Menurut R. Imanda (Hasil wawancara langsung, 4 November 2025), Setelah mengetahui siapa yang diseleksi, untuk mengetahui bagaimana rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai gerindra maka perlu diketahui juga siapa yang melakukan seleksi. Dalam hal ini, siapa yang menyeleksi dapat merujuk pada lembaga yang menyeleksi bakal calon kepala daerah (Putra, 2016). Proses penjaringan dilakukan oleh partai gerindra dalam mempersiapkan pilkada khususnya di Kabupaten Banyumas. Partai gerindra membentuk tim desk pilkada untuk menjalankan serangkaian rekrutmen dan kandidasi. Pembentukan tim desk pilkada juga sekaligus dalam rangka persiapan menghadapi pilkada.

Menurut Yusup (Hasil wawancara langsung, 11 Desember 2025), Pembentukan tim desk pilkada berisi beberapa jabatan yang memiliki bidangnya masing-masing. Diantaranya ketua, sekretaris, koordinator penjaringan & pendalaman, koordinator kemenangan & logistik dan bagian administrasi & database. Adapun tugas atau fungsi dari adanya tim desk pilkada pada proses pencalonan diantaranya membuka dan

mengumumkan pendaftaran bakal calon untuk selanjutnya dilaksanakan verifikasi. Selanjutnya tim desk pilkada melakukan penilaian awal terhadap bakal calon untuk kemudian dilakukan wawancara dan pendalaman. Tak hanya itu, tim penjaringan juga melakukan komunikasi politik dengan potensial mitra koalisi. Secara administratif, tim penjaringan menyusun surat rekomendasi serta menjembatani komunikasi antara calon dengan partai ataupun dengan struktural lembaga baik DPD dan DPP.

Adanya tim desk pilkada dalam partai gerindra bersifat ad-hoc karena hanya dibentuk pada pelaksanaan pilkada saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Rachmat Imanda :

“Iya di DPC (tim desk pilkada), dan begitu acara selesai (maka) tim desk pilkada dibubarkan. Jadi mengikuti dan nanti dibentuk lagi kalo misal ada. Jadi berdasarkan acara.” (R. Imanda, hasil wawancara pribadi, 4 November 2025).

Selain tim penjaringan atau desk pilkada yang dibentuk di tingkat DPC, terdapat unsur lain yang memiliki peran dalam penentuan bakal calon kepala daerah yang diusung dari Partai Gerindra. Hal ini sekaligus menjawab *when selected*. Adapun unsur tersebut hadir dari DPD dan DPP Partai Gerindra. DPD merupakan Dewan Pengurus Daerah atau perwakilan Partai Gerindra di tingkat provinsi. Sedangkan DPP atau Dewan Pengurus Pusat merupakan perwakilan Partai Gerindra di tingkat pusat. DPD dan DPP memiliki peran dalam penentuan keputusan bakal calon kepala daerah seperti yang diungkapkan oleh Adhi Wiharto yang merupakan anggota dari tim penjaringan pilkada DPC Gerindra Banyumas:

“Kalau di level banyumas iya, calegnya DPC (yang) rekrut, pilkada juga (DPC yang) rekrut tapi yang mutusin tetap DPP. Jadi kita masukkan (nama bakal calon) ke DPD kadang-kadang di DPD tetap akan ditinjau lagi setelah itu DPD buat penilaian lalu dikirim ke DPP, baru DPP memutuskan arahnya mau ke siapa itu untuk pilkada. Tapi kalo pencalegan surat rekomnya lebih kepada nomor urut” (A. Wiharto, hasil wawancara pribadi, 18 September 2025).

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa surat rekomendasi merupakan sebuah hal yang penting. Surat rekomendasi

dianggap sebagai izin dari pimpinan partai kepada pengurus partai di daerah untuk dapat melaksanakan agenda partai di tingkat lokal. Selain itu, surat rekomendasi juga dapat dipahami sebagai tanda bahwa pengambilan keputusan partai di tingkat lokal harus mengikuti keputusan pusat (DPP) sebagai keputusan akhir.

Dalam mengetahui proses rekrutmen partai gerindra kemudian perlu dilihat berdasarkan bagaimana proses seleksi dijalankan (*How Selected*). Seperti yang diungkapkan oleh Bobby Listyo yang merupakan Ketua tim desk Pilkada DPC Banyumas pada media berita *online* bahwa terdapat tiga tahapan dalam pencalonan kepala daerah. Adapun ketiga tahapan tersebut yaitu pengambilan formulir dari 23 hingga 31 Mei 2024, kemudian 3 hingga 8 Juni 2024 pengambilan formulir dan selanjutnya akan dilakukan pendalaman. Pendalaman akan dilakukan melalui wawancara. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa calon-calon yang mendaftar dan memenuhi persyaratan nanti akan disampaikan ke DPD dan DPP. (Sumarwoto, 2024).

Selain itu, Rachmat Imanda juga menyampaikan terkait mekanisme proses rekrutmen dalam penentuan bakal calon kepala daerah:

“Dari pembukaan pendaftaran, maka nanti kita akan memanggil yang bersangkutan untuk dikaji lebih dalam tentang keseriusan dan segala macam. Kemudian kita *soundingkan* dengan partai lain supaya terjadi koalisi, *kaya gitu* urutannya. *Nah* dari situ muncul lah tim pemenang, jadi urutannya *kaya gitu*. Jadi siapapun kalo di internal gerindra tentunya berharap ada kader sendiri yang bisa maju dalam pilkada. Dan proses itu harus dilalui melalui tim desk pilkada.” (R. Imanda, hasil wawancara pribadi, 4 November 2025).

Berdasarkan Teori Rahat dan Hazan tentang rekrutmen dan kandidasi, terdapat beberapa hal pokok yang terkait dalam rekrutmen dan kandidasi DPC Gerindra Banyumas khususnya soal klasifikasi jenis rekrutmen dan kandidasi yang dijalankan. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 1. Klasifikasi Sistem Rekrutmen dan Kandidasi Partai Gerindra pada Pilkada Banyumas Tahun 2024

4 indikator menurut Rahat dan Hazan	Implementasi Rekrutmen dan Kandidasi Partai Gerindra pada pilkada banyumas	Klasifikasi Sistem Rekrutmen dan Kandidasi DPC Gerindra Banyumas
Siapa yang diseleksi	1. Kader Partai (Rachmat Imanda) 2. Non Kader	Inklusif, karena semua orang diperkenankan mendaftar
Siapa yang menyeleksi	Tim Desk Pilkada yang bersifat adhoc	Penyeleksi eksklusif oleh pimpinan partai
Dimana kandidat diseleksi	Gerindra dengan tiga tingkatan yaitu DPC, DPD dan DPP	Sentralistik, keputusan akhir ada di DPP
Bagaimana kandidat diseleksi	1. Pengambilan formulir 2. Pengembalian formulir 3. Pendalaman dengan keputusan akhir pada DPP melalui surat rekomendasi	Penunjukkan melalui surat rekomendasi

Systemnees atau sistem dalam sebuah partai politik dapat menunjukkan tingkat pelembagaan suatu partai politik. Suatu partai yang terlembaga dengan baik maka dalam menjalankan sistem juga menganut nilai demokrasi. Namun, dalam hal ini partai gerindra belum memiliki aturan formal yang lebih riid mengenai proses penjaringan seperti syarat, kualitas

kader yang berhak maju sebagai bakal calon kepala daerah atau *timeline* pelaksanaan penjangkaran yang matang. Tidak hadirnya aturan yang baku yang tertuang dalam AD/ART memicu proses rekrutmen yang kurang ideal dan tidak maksimal. Selain itu, ketiadaan aturan tersebut mendorong adanya perubahan dukungan.

2. *Value Infusion*

Value infusion merujuk pada penanaman nilai yang menjadi dasar dalam berjalannya suatu partai politik. Indikator *value infusion* dalam pelebagaan partai politik masih menyangkut soal internal seperti dalam indikator sistem. Sebuah partai politik dapat dikatakan berhasil jika anggota atau *grassroot* terikat secara emosional karena telah menciptakan kultur dan sistem nilai sendiri yang memperkuat kohesi dan loyalitas internal (Randall & Svasand, 2002). Namun, dewasa ini partai politik di Indonesia masih mengalami permasalahan seputar ideologi atau nilai yang diperjuangkan. Banyak dari partai politik di Indonesia masih mengandalkan figure atau ketokohan suatu aktor tertentu. Salah satunya yaitu partai gerindra dengan figur atau ketokoh yang memiliki pengaruh besar khususnya dalam popularitas partai.

Secara formal, partai gerindra menyatakan bahwa partai gerindra merupakan partai dengan landasan Pancasila. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 Bab II Anggaran Dasar Partai Gerindra. Pada AD/ART tidak disinggung secara spesifik mengenai ideologi yang dianut. Namun, berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa partai gerindra merupakan partai dengan ideologi nasionalis. Jadi, partai gerindra tidak secara spesifik menonjolkan ideologi dalam kepentingan partai politiknya. Berbeda dengan beberapa partai yang menonjolkan agama seperti PKS. Karakter ideologis gerindra yang tidak secara eksplisit menunjukkan ideologisnya membuat Gerindra lebih menyerupai *catch-all party*. *catch-all party* yaitu partai yang berusaha merangkul dukungan dari berbagai kelompok tanpa terikat pada ideologi yang kaku. Ketidakjelasan orientasi

partai gerindra membuat partai ini lebih banyak bertumpu pada ketokohan Prabowo Subianto sebagai sumber identitas dan daya tarik politik utama.

Di Kabupaten Banyumas, ketokohan Prabowo Subianto memiliki fungsi sebagai salah satu sumber identitas dan daya tarik politik utama bagi Partai Gerindra. Hal tersebut ditunjukkan karena adanya ikatan historis melalui kakek Prabowo yang merupakan putra daerah Banyumas. Hal ini tercermin dalam pemilihan lokasi deklarasi Koalisi Banyumas Maju yang diselenggarakan di kompleks makam Dawuhan yaitu tempat kakek Prabowo dimakamkan. Pemilihan tempat dapat dibaca sebagai simbol politik untuk menyatakan adanya hubungan keluarga Prabowo Subianto dengan Putra Banyumas. Selain itu, hal tersebut juga sekaligus memperkuat legitimasi inisiatif DPC Gerindra Banyumas dalam pembentukan koalisi. Pemanfaatan simbol-simbol tersebut menunjukkan bagaimana ketokohan Prabowo tetap menjadi elemen penting dalam strategi politik Gerindra di tingkat lokal, termasuk dalam dinamika menjelang Pilkada Banyumas 2024.

Value infusion merujuk pada penanaman sebuah nilai dalam partai politik yang dijadikan sebagai rujukan untuk menentukan keputusan partai dan arah kebijakan yang diperjuangkannya. Sedangkan partai gerindra tidak memiliki ideologi yang pasti dan menjadikan dirinya *catch all party*. Hal tersebut menjadikan *value infusion* lemah. Selain itu, ketidakpastian ideologi memiliki dampak yang buruk bagi demokrasi karena partai politik tidak menyediakan program yang jelas berdasar pada ideologi sehingga memunculkan politik transaksional. Sedangkan munculnya ketokohan Prabowo subianto mengakibatkan partai gerindra semakin bergantung kepada suatu tokoh sehingga penanaman nilai dalam partai politik lebih bersifat personal dibandingkan ideologis.

3. *Decisional autonomy*

Decisional Autonomy atau otonomi kebijakan atau pengambilan keputusan. Dalam hal ini merujuk pada hubungan partai dengan aktor yang berada di luar partai. Dalam hal ini *decisional autonomy* dapat dilihat untuk mengetahui kemampuan DPC Gerindra Banyumas dalam menentukan langkah politiknya secara mandiri tanpa ada intervensi dari manapun. Adapun tingkat kemandirian tersebut dapat dilihat melalui hubungan DPC, DPD dan DPP khususnya soal keputusan dalam pilkada baik dalam hal penjangkaran hingga keputusan dari adanya perubahan dukungan tersebut.

Menurut A. Wiharto (Hasil wawancara langsung, 18 September 2025), hubungan DPP dan DPC dalam keputusan pencalonan pada pilkada memiliki kewenangannya masing-masing. DPP memiliki posisi yang penting karena mengeluarkan keputusan yang bersifat akhir atau *final*. Jadi, DPP yang menentukan bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Gerindra. Sedangkan DPC hanya sebatas rekrutmen dan mengusulkan kepada DPP. Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan DPC dalam proses pilkada sangat terbatas dengan hanya melakukan penjangkaran dan pengusulan bakal calon.

Selain itu terkait adanya perubahan dukungan Adhi Wiharto juga menyampaikan bahwa adanya perubahan dukungan diinisiasikan oleh dirinya atas persetujuan DPP :

“Kebetulan yang menginisiasi supaya berubah untuk mendukung PDIP untuk sadewo dan lintarti *kan* aku (Adhi Wiharto). Sana (PDIP) yang melakukan *lobby* ke kita, Jadi sana (PDIP) *ngelobby* ke Ketua DPC, ketua DPC laporan ke Ketua DPD, dan Ketua DPD *gak* mau. Tapi karena kondisi Maaruf dan Imanda jika diteruskan pasti kalah jadi akhirnya aku (Pak Adhi) memberanikan diri buat telfon DPD untuk menjelaskan dan akhirnya aku (pak adhi) bertemu dan ya udah akhirnya beralih.” (A. Wiharto, hasil wawancara pribadi, 18 September 2025).

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya perubahan dukungan hanya dapat terlaksana setelah adanya inisiatif dari aktor lokal (dalam hal ini Adhi Wiharto) untuk melakukan komunikasi langsung ke DPD, serta baru

mendapatkan persetujuan setelah melalui mekanisme informal tersebut, memperlihatkan bahwa *decisional autonomy* DPC Gerindra Banyumas sangat terbatas. Proses yang terjadi tidak mencerminkan kemandirian struktural, melainkan menunjukkan ketergantungan kuat pada otoritas di tingkat atas. Dengan demikian, perubahan dukungan bukanlah hasil keputusan mandiri DPC berdasarkan dinamika lokal, tetapi merupakan keputusan yang tetap harus dibentuk dan dilegalkan melalui struktur hierarkis partai. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa DPP memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan pada pilkada. DPP dalam hal ini memiliki wewenang sebagai penentu atau pengambil keputusan secara *final* untuk kemudian dijalankan oleh DPC.

Konsep *decisional autonomy* merujuk pada kemampuan partai mengambil keputusan politik mandiri tanpa hadirnya intervensi pusat atau aktor luar. Dalam hal ini, pengambilan keputusan oleh DPC Gerindra Banyumas masih kuat dipengaruhi oleh DPP Partai Gerindra. Bukan hanya itu, bahkan DPC Gerindra Banyumas tidak diberikan ruang untuk memberikan keputusan secara *final* karena segala keputusan sifatnya hadir dari DPP. Meskipun dalam hal ini, muncul aktor politik yaitu Adhi Wiharto untuk menginisiasi adanya perubahan dukungan tersebut namun keputusan tersebut juga memerlukan DPP sebagai hasil *final*.

4. *Reification*

Reification yaitu derajat pengetahuan publik (*reification*) terhadap suatu partai politik berkaitan dengan pengetahuan publik pada partai politik, merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik (Suryana, Ardiansyah, & Manan, 2020). Di Kabupaten Banyumas, tingkat pengetahuan publik terhadap Partai Gerindra dapat dikatakan relatif tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang memperkuat keberadaan Gerindra dalam imajinasi publik khususnya di Banyumas. Pertama, adanya makam kakek Prabowo Subianto di Banyumas yang dapat dipahami dengan adanya simbol kekerabatan

historis antara Prabowo dan kakeknya. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan adanya kedekatan psikologis masyarakat Banyumas terhadap tokoh utama Gerindra.

Kedua, kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024 di Banyumas. Hal tersebut menunjukkan keterpilihan Prabowo di Kabupaten Banyumas merupakan hal positif untuk DPC Gerindra Banyumas. Kemenangan tersebut juga dapat dilihat sebagai adanya penerimaan dari masyarakat banyumas atas hadirnya partai Gerindra ditengah dominasi PDIP dalam kompetisi politik lokal di banyumas. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa citra Gerindra di Kabupaten Banyumas sudah semakin dikenal dan diterima oleh pemilih, sehingga memperoleh legitimasi elektoral yang lebih kuat.

Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa partai Gerindra di Kabupaten Banyumas memiliki citra yang cukup baik. Namun dalam pelaksanaan pilkada, citra baik tersebut tidak dimanfaatkan karena munculnya keputusan perubahan dukungan tersebut. Citra baik yang dimiliki Partai Gerindra di Banyumas mendorong harapan masyarakat banyumas atas pengusungan bakal calon kepala daerah dari partai Gerindra khususnya atas pengusungan kadernya yaitu Imanda. Hal tersebut menimbulkan kekecewaan khususnya pada tingkat akar rumput partai Gerindra di banyumas.

Kekecewaan terhadap partai Gerindra di Banyumas disampaikan oleh salah satu loyalis partai Gerindra atas keputusan perubahan dukungan yang dipilih, Suwandi menyampaikan :

“Sangat kecewa dengan keputusan perubahan dukungan yang dipilih oleh Gerindra keputusan tersebut membuat nama partai Gerindra hancur untuk kedepannya. Orang yang dulu sangat semangat dengan partai Gerindra kemudian kecewa. Sehingga orang-orang yang berada pada akar rumput kebanyakan memilih untuk mendukung kolom kosong”. (Suwandi, hasil wawancara pribadi, 2 Desember 2025).

Derajat pengetahuan publik partai gerindra khususnya di Banyumas sebenarnya cukup tinggi. Khususnya setelah kemenangan Prabowo sebagai presiden. Tingkat pengetahuan publik tersebut seharusnya dapat dijadikan salah satu dasar atau rujukan oleh Partai Gerindra untuk dapat bertarung dalam pilkada Kabupaten Banyumas. Namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh DPC Gerindra banyumas dalam pilkada. Munculnya perubahan dukungan menimbulkan kekecewaan pada loyalis gerindra. Sehingga keputusan yang dipilih oleh loyalis gerindra pada pilkada tidak sesuai dengan keputusan partai yaitu dengan pilihan untuk mendukung kolom kosong.

Perubahan Dukungan DPC Gerindra dalam Pilkada Banyumas

Perubahan dukungan DPC Gerindra Banyumas dilakukan dalam bentuk pengusungan Sadewo - Lintarti. Pasangan Sadewo - Lintarti merupakan satu-satunya pasangan calon kepala daerah yang muncul. Sebelum DPC Gerindra Banyumas memutuskan untuk mendukung Sadewo – Lintarti, pasangan tersebut diusung oleh delapan partai politik yaitu PDIP, PKB, PKS, PAN, PPP, Perindo, Partai Ummat, dan Partai Gelora (Zain & Putri, 2024).

Adapun alasan terkait perubahan dukungan tersebut disampaikan oleh Yoga Sugama selaku Wakil Ketua DPC Partai Gerindra. Perubahan dukungan ini terjadi karena adanya permasalahan komunikasi dengan Ma'ruf Cahyono (Firmansyah, 2024). Alasan yang sama juga diungkapkan oleh Rachmat Imanda, bakal calon wakil bupati dari partai gerindra :

“Jadi waktu itu, surat rekomendasinya sudah turun. Kita menunggu Pak Maaruf untuk bisa hadir ke partai. Dan untuk memastikan program pemenangan dan lainnya. Tapi, beliau sulit dihubungi. Jadi akhirnya diputuskan untuk mencari lainnya sebagai calon bupatinya atau saya suruh maju ke bupatinya. Tapi di waktu yang mepet, cari yang baru itu sulit kemudian saya sendiri belum punya kapasitas.” (R. Imanda, hasil wawancara pribadi, 4 November 2025).

Selain itu Adhi Wiharto yang merupakan bagian dari tim penjangkaran bakal calon kepala daerah DPC Gerindra Banyumas menyampaikan bahwa adanya perubahan dukungan tersebut terjadi karena ketidaksiapan masing-masing bakal calon. Adapun ketidaksiapan calon lebih lanjut dijelaskan karena ketidaksiapan modal politik yang kuat :

“Dua orang ini tidak ada kecocokan sebagai pasangan calon. Uangnya sama-sama tidak siap. Kalo Maaruf sebenarnya pada saat penjangkaran awalnya *ngomong* sekian uang, sekian puluh miliar dan waktu itu kisaran 40-60 M (Miliar), dan kemungkinan sudah menang.” (A. Wiharto, hasil wawancara pribadi, 18 September 2025).

Adanya perubahan dukungan yang terjadi pada partai Gerindra disebabkan karena ketidaksiapan masing-masing bakal calon utamanya perihal modal politik. Perubahan dukungan tersebut menunjukkan adanya dinamika pada internal partai. Adapun dinamika tersebut membawa dampak hingga pada pelaksanaan politik lokal di Kabupaten Banyumas.

Menurut A. Wiharto (Hasil wawancara langsung, 18 September 2025), hal lain juga disampaikan terkait dengan alasan perubahan dukungan. Adhi Wiharto menyampaikan adanya sikap pesimisme jika tetap mencalonkan Maaruf – Imanda. Adanya perubahan dukungan sebagai keputusan akhir dipilih untuk menghindari posisi partai dari kerugian.

Menurut A. Wiharto (Hasil wawancara langsung, 18 September 2025), dengan berubahnya dukungan DPC Gerindra Banyumas kepada Sadewo-Lintarti menimbulkan adanya calon tunggal dalam kompetisi pilkada di Kabupaten Banyumas. Sebelumnya, partai Gerindra menginisiasi dalam pembentukan Koalisi Banyumas Maju. Adanya inisiasi pembentukan koalisi Banyumas Maju diungkapkan oleh Adhi Wiharto yang merupakan tim desk pilkada dan penjangkaran bakal calon kepala daerah DPC Gerindra Banyumas. Namun sebelumnya penulis sempat menanyakan bahwa apakah adanya koalisi Banyumas Maju terinspirasi dari koalisi Indonesia Maju pada saat pemilihan presiden dan diinisiasikan oleh partai Gerindra. Adhi Wiharto menyampaikan bahwa adanya pembentukan Koalisi

Banyumas Maju dan Koalisi Indonesia Maju memang *dimotori* oleh Partai Gerindra baik pada level pusat pada pemilihan presiden dan DPC Gerindra Banyumas pada pilkada. Namun anggota partai politik antara KIM dan KBM terdapat sedikit perbedaan namun hampir relatif sama.

Adapun partai politik yang tergabung dalam koalisi banyumas maju diantaranya partai gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, Golkar dan PSI. Hal tersebut terlihat pada dilaksanakannya deklarasi banyumas maju yang dilaksanakan di Desa Dawuhan Kecamatan Banyumas yang berada dekat dengan kompleks pemakaman kakek Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto.

Gambar 1. Deklarasi Koalisi Banyumas Maju di Komplek Makan Dawuhan

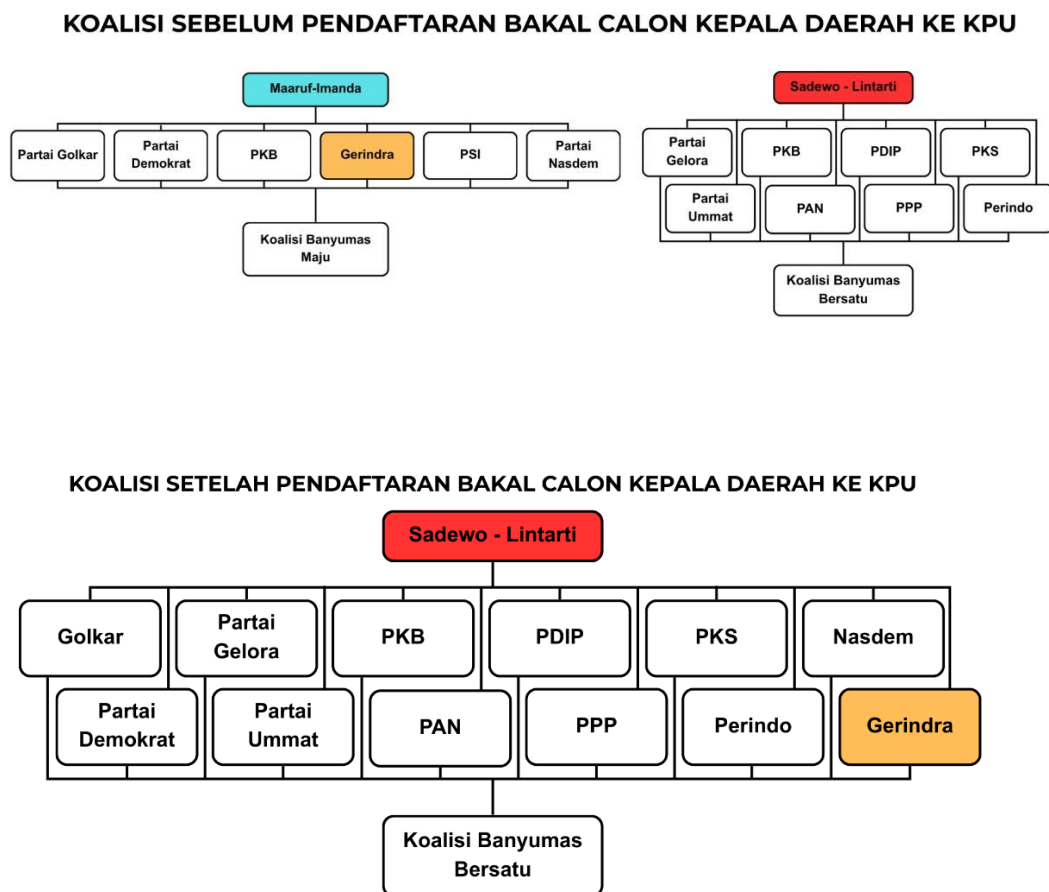


Sumber : Metro Jateng, Deklarasi Koalisi Banyumas Maju, Satukan Lima Parlemen Plus PSI, <https://metrojateng.com/2024/07/10/deklarasi-koalisi-banyumas-maju-satukan-lima-partai-parlemen-plus-psi/>.

Adanya pembentukan koalisi banyumas maju merupakan “*angin segar*” dalam pelaksanaan pilkada. Hal tersebut karena kondisi politik banyumas yang dikuasai oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baik dalam perolehan suara anggota legislatif atau dominasi

kekuasaan pada lembaga eksekutif sebelumnya. Sehingga dengan munculnya koalisi banyumas maju diharapkan mampu untuk menyaingi kekuatan politik PDIP di Kabupaten Banyumas serta membuka ruang kompetisi lokal yang lebih luas. Selain itu, hadirnya beberapa pasangan calon kepala daerah juga dapat menjadi pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan siapa yang dianggap layak untuk menjadi calon kepala daerah.

Gambar 2. Peta partai politik sebelum dan setelah pendaftaran bakal calon kepala daerah ke KPU



Adanya perubahan dukungan oleh DPC Gerindra Banyumas menunjukkan bahwa masih munculnya sikap pragmatisme oleh partai politik. Pragmatisme terlihat dalam keputusan yang diambil oleh DPC Gerindra Banyumas dalam pilkada. Alasan tidak dimilikinya modal politik oleh bakal

pasangan calon kepala daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada masih bersifat transaksional. Modal politik yang merujuk pada kebutuhan finansial seolah menyampingkan bahwa kemenangan seharusnya berdasar pada dukungan massa serta legitimasi di tingkat akar rumput. Selain itu, bentuk pragmatisme juga terlihat ketika Partai Gerindra memutuskan untuk bergabung dengan koalisi Sadewo-Lintarti demi menghindari kerugian partai. Sejatinya koalisi terbentuk untuk mengusung calon pemimpin didasarkan pada kesamaan visi, misi dan ideologi partai sehingga idealisme dapat diperjuangkan (Ekowati, 2019). Sehingga dengan bergabungnya partai gerindra dengan koalisi Sadewo-Lintarti seolah mengabaikan ideologi dari partai dan hanya berorientasi pada kemenangan.

Kesimpulan

Kualitas internal partai politik merupakan satu hal yang penting dalam perjalanan sebuah demokrasi. Berkaitan dengan penelitian ini, kualitas internal partai politik berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai langkah politik dalam strategi memenangkan partai pada kompetisi elektoral. Kualitas internal suatu partai politik dapat dilihat melalui tingkat pelebagaan partai. Partai politik dengan tingkat pelebagaan yang tinggi dapat menyiapkan strategi yang matang untuk menghadapi tantangan politik.

Perubahan dukungan DPC Gerindra Banyumas dari yang awalnya Maaruf – Imanda dengan Imanda merupakan kader potensial di DPC Gerindra Banyumas namun berubah menjadi Sadewo – Lintarti yang semula diusung oleh PDIP, PKB, PKS, PAN, PPP, Perindo, Partai Ummat, dan Partai Gelora. Perubahan dukungan juga dipicu karena lemahnya pelebagaan DPC Gerindra Banyumas yang menyebabkan optimalisasi fungsi partai khususnya rekrutmen politik tidak berjalan secara maksimal. Sehingga memunculkan perubahan dukungan oleh partai gerindra yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam pilkada Kabupaten Banyumas sehingga tingkat demokrasi semakin menurun.

Riset ini memberikan pandangan bahwa munculnya calon tunggal di Pilkada Kabupaten Banyumas 2024 tidak semata-mata disebabkan oleh dinamika koalisi antar partai. Namun lebih jauh, fenomena tersebut berakar pada lemahnya pelembagaan Partai Gerindra di tingkat DPC Banyumas, sebagaimana diukur melalui indikator *systemness*, *value infusion*, dan *decisional autonomy* ala Randall & Svåsand (2002).

Daftar Pustaka

- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik : Antara Koalisi, Pencalonan dan Calon Tunggal dalam Pilkada. *Jurnal Transformative* 5(1), 5(1), 20-34. doi:<https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.2>
- Fadlurrohman, A. Z. (2017). Problem Pelembagaan Partai Politik dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur. *Jurnal Transformative*, 3(2), 17-25.
- Firmansyah, A. (2024, Agustus 28). *Koalisi Gerindra dkk di Pilkada Banyumas Bubar, Kini Dukung Jagoan PDIP*. Retrieved from Detik Jateng Pilkada: <https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7513559/koalisi-gerindra-dkk-di-pilkada-banyumas-bubar-kini-dukung-jagoan-pdip>
- Pratama, A., Rusta, A., & Tamrin. (2022). Pelembagaan Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022. *Jurnal Suara Politik*, 1(2), 2-5.
- Prihatmoko, J. J. (2022). Rekrutmen PDIP dalam Pilkada 2020 : Antara Strategi Pemenangan dan Pelembagaan Partai. *Jurnal Spektrum*, 19(2), 6-22. doi:10.31942/spektrum.v19i2.6655
- Putra, M. S. (2020). Studi tentang rekrutmen bakal calon walikota oleh PDIP pada pemilihan kepala daerah kota bontang tahun 2020. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 808-809.
- Putra, R. H. (2016). Proses Kandidasi Pasangan Rasiyo dan Lucy Kurniasari pada Pilkada Surabaya Tahun 2015. *Repository Unair*, 4-12.
- Randall, V., & Svasand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Sage Publications*, 8(1), 9-23. Retrieved from 10.1177/1354068802008001001

- Rokhani. (2023). *Penelitian Kualitatif : Pembelajaran berbasis kasus untuk mahasiswa penyuluhan pertanian*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Sajian, A., RR.Cahyowati, & Wibowo, G. D. (2023). Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Muqodimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 7(2), 339-341. doi:<https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.1-7>
- Sevindo, D. A., Asrinaldi, & Rusta, A. (2023). Pelembagaan Partai Gerindra Dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. *Jurnal Suara Politik*, 2(2), 25-38. doi:<https://doi.org/10.31869/jsp.v2i2.4961>
- Sidiq, M., Kurniawan, R. C., Warganegara, A., & Barokah, F. (2023). Kehadiran Partai Gelombang Rakyat Indonesia Sebagai Manajemen Konflik Internal Partai Politik. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 279-281. doi:<https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2822>
- Sumarwoto. (2024, Mei 23). *Sekretaris Partai Gerindra Banyumas pastikan maju sebagai bacabup*. Retrieved from Antara Kantor Berita Indonesia: <https://www.antaranews.com/berita/4118850/sekretaris-partai-gerindra-banyumas-pastikan-maju-sebagai-bacabup>
- Suryana, N., Ardiansyah, A. G., & Manan, F. (2020). Pelembagaan Partai Politik : Studi Partai Solidaritas Indonesia Kota Bandung Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 55-60. doi:<https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10677>
- T.R, Ridha M. (2016). Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal : Fenomena Politik Klan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 175-176. doi:<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11855>

- Wahyudi, A. (2024, Mei 24). *Penjaringan Calon Bupati-Wakil Bupati Banyumas Partai Gerindra Dibuka, Imanda Pengambil Formulir Pertama*. Retrieved from Suara Merdeka: <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0912742308/penjaringan-calon-bupati-wakil-bupati-banyumas-partai-gerindra-dibuka-imanda-pengambil-formulir-pertama>
- Zain, F. M. (2024, Juni 7). *Klaim Didukung Semua PAC, Sekretaris Gerindra Rachmat Imanda Mantap Maju Cabup*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2024/06/07/053400878/klaim-didukung-semua-pac-sekretaris-gerindra-banyumas-rachmat-imanda-mantap>
- Zain, F. M., & Putri, G. S. (2024, Agustus 28). *Koalisi Delapan Parpol Usul Saddewo - Lintarti Pada Pilkada Banyumas*. Retrieved from Kompas.com: Koalisi Delapan Parpol Usung Sadewo-Lintarti pada Pilkada Banyumas